

SALINAN

K E P U T U S A N
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 No.: 038/U/1979
 tentang

SMP NEGRI I AMBARAWA	POL. INDR. NO.	022/C.3.
	TANGGAL TGL.	17 - 4 - 1979
	DITINJUH TGL.	
	DAFTAR TAHUN	

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
 Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
 Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 003f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 43 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1973;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 003f/U/1975,
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975,
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

- Mengingat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-188/I/MENPAN/2/79.



M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur C Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersbut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.j.

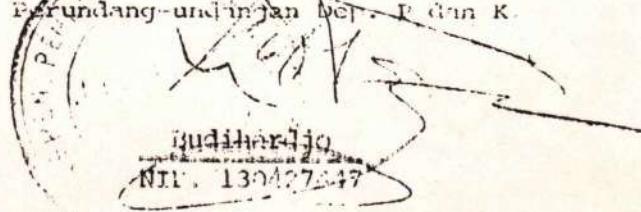
(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

S/ L/IN/MI Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
Ketua BPK pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan DPK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
10. Ditjen., Hukum dan Perundang undangan Dep. Kehakiman
11. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
12. Semua Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
13. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademisi dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
15. Lain Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Ditjen. Iejak,
18. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
19. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
20. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
21. Badan Administrasi Kepegawai Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. WIENAS,
25. L.I.I.I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diperlukan seperlunya.

Salinan-sugani dengan aslinya:
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang undangan Dep. P dan K.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kab. Pemalang								
125.	SMP Neg. Pemalang	Jl. Jend. A. Yani Selatan Pemalang	SMP Neg. III Pemalang	Jl. Jend. A. Yani Selatan Pemalang	Jl. Jend. A. Yani Selatan Pemalang	Jl. Jend. A. Yani Selatan Pemalang	Senarang	
126.	ST Neg. I pemalang	Jl. Fermira II Pemalang	SMP Neg. Taman	SMP Neg. II Comal	Jl. Jend. A. Yani Comal Pemalang	Jl. Jend. A. Yani Comal Pemalang	Senarang	
127.	ST Neg. Corai	Jl. Jend. A. Yani Corai Pemalang	SMP Neg. IV Pemalang	Jl. Jend. A. Yani Comal Pemalang	Jl. Jend. A. Yani Comal Pemalang	Jl. Jend. A. Yani Comal Pemalang	Senarang	
Kab. Semarang								
128.	SMP Neg. Pemalang	Jl. Surbing 2 Pemalang	SMP Neg. IV Pemalang	Jl. Surbing 2 Pemalang	Jl. Surbing 2 Pemalang	Jl. Surbing 2 Pemalang	Semarang	
129.	SKK Neg. Randudongkal	Rec. Randu- dongkal	SMP Neg. Bantarbelang	Rec. Iantari- rolong Pemalang	Rec. Tengaran Semarang	Rec. Tengaran Semarang	Senarang	
130.	ST Neg. Ungaran*	Jl. Diponegoro Ungaran	SMP Neg. Tangeran	Rec. Tengaran Semarang	Rec. Tengaran Semarang	Rec. Tengaran Semarang	Senarang	
131.	ST Neg. II Arbarawa	Jl. Perwira 6 Arbarawa	SMP Neg. Arbarawa	Jl. Perwira 6 Arbarawa	Jl. Perwira 6 Arbarawa	Jl. Perwira 6 Arbarawa	Senarang	
Kab. Kendal								
132.	SMP Neg. Patebon	Kec. Patebon Kendal	SMP Neg. Patebon	Kec. Patebon Tegal	Kec. Patebon Tegal	Kec. Patebon Tegal	Senarang	
133.	ST Neg. II Kendal	Kec. Gemuh Kendal	SMP Neg. Gemuh	Kec. Gemuh Kendal	Kec. Gemuh Kendal	Kec. Gemuh Kendal	Senarang	
134.	SMP Neg. Salatiga	Jl. Kridango Salatiga	SMP Neg. XII Salatiga	Jl. Kridango Salatiga	Jl. Kridango Salatiga	Jl. Kridango Salatiga	Senarang	
135.	ST Neg. II Salatiga	Jl. Dr. Surya- di 9 Salatiga	SMP Neg. IV Salatiga	Jl. Dr. Surya- di 9 Salatiga	Jl. Dr. Surya- di 9 Salatiga	Jl. Dr. Surya- di 9 Salatiga	Senarang	

Sik. Krayjian & H. Pambawan.

No. 4361/B/III.-

KUTIPAN dari Daftar Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Djakarta, 25 Agustus 1956.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membatas:

surat-2 Kepala Inspeksi Pusat Pengajaran Teknik tentang Sekolah2 dan Kursus2 Pengajaran Teknik dalam Daerah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa:

dengan pengubahan susunan Sekolah2 dan Kursus2 dengan pendidikan dan pengajaran Teknik seperti ditetapkan dengan putusan kami tanggal 18 Juni 1956 No: 35673/S perlu menghapuskan semua Sekolah2/Kursus2 pendidikan dan pengajaran Teknik yang ada pada tanggal 31 Juli 1956 dan menggantinya dengan Sekolah2/Kursus2 pendidikan dan pengajaran Teknik dengan susunan baru mulai 1 Agustus 1956;

Mengingat:

- a. Putusan Menteri P.P.K. tanggal 18 Juni 1956 No: 35673/S;
- b. Semua putusan-2 Menteri P.P.K. mengenai pembukaan, perobahan, perintisian Sekolah2/Kursus2 dengan pendidikan dan pengajaran Teknik menurut susunan lama;

M E M U T U S K A N :

Pertama:

Menghapuskan Sekolah2/Kursus2 pendidikan dan pengajaran Teknik yang ada pada tanggal 31 Juli 1956 menurut ketentuan yang ditetapkan dalam "Kedua" dari putusan Menteri P.P.K. tanggal 18 Juni 1956 No: 35673/S;

Kedua:

Menetapkan, dibuka mulai tanggal 1 Agustus 1956 Sekolah2/Kursus2 dengan pendidikan dan pengajaran Teknik seperti tertera pada lampiran-2 surat putusan ini;

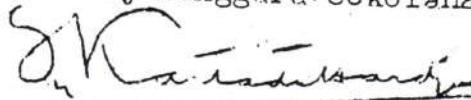
dengan ketentuan, bahwa:

- a. penerimaan murid2 kelas I pada Sekolah Teknik 3 tahun untuk tahun pengajaran 1956/1957 ditetapkan menurut kebijaksanaan Inspeksi Pengajaran Teknik Daerah, akan tetapi untuk selanjutnya dengan berdasarkan lulusan Ujian Nasional Sekolah Landjutan Tingkat Pertama;
- b. biaya pengeluaran sekolah-hal-hal tersebut diberatkan untuk:
 1. S.T. 3 tahun pada mata anggaran 10.4.29 dan 10.4.30.;
 2. S.M. 2 tahun pada mata anggaran 10.4.14.;
 3. S.T.M. 3 tahun dan K.A.T.M. pada mata anggaran 10.4.28.;
 4. S.C.P.T. 3 tahun pada mata anggaran 10.4.22.;
 5. K.A.T.B., P.C.S.L.P. Teknik dan Kursus D.-I Teknik pada mata anggaran 10.4.8. dari anggaran Belanja Kementerian P.P.K. tahun 1956 dan untuk selanjutnya pada mata anggaran yang selaras.

Jamurah - JG.

c. Kepala dari Sekolah2 dan Kursus2 terter- pada daftar terlampir pada
lah Comtabele.

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:
Kepala Djawatan Pengadjaran
Atas nama Beliau:
Kepala Bagian Penjelenggara Sekolah2/Kursus,



(SOENARIA KARTADIHARDJA)

Minuut dari surat putusan
ini ditanda tangani oleh
Kepala Djawatan Pengadjaran.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Kementerian Keuangan di Djakarta.
4. Perb. Umum Negeri (Thesaurie Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. Semua Kantor Pusat Perpendaharaan.
6. Semua Kepala S.T.P., Sek.Keradijan, S.T.M., S.G.P.T., K.A.T.A., K.A.T.B., Kursus B-I, P.G.S.L.P. Negeri.
7. Semua Inspeksi S.T./S.T.P.
8. Inspeksi Pusat Pengajaran Tehnik, Djalan Hanglekirk II Kebeleuan Baru di Djakarta (5).
9. Semua Penilik S.T.P. Negeri.
10. P.B. Perabuan Guru Tehnik Indonesia (P.G.T.I) Djalan Tjibeuning Utara di Bandung.
11. Semua Inspeksi Pengajaran Pusat.
12. Semua Kepala Kantor Inspeksi Daerah.
13. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat no.132 di Djakarta.
14. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Djawatan Gedung2 Pusat, Kramat no. 63 di Djakarta.
15. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Djawatan Gedung2 Pusat, Bagian Persewaan dan Pergunsan, Kramat no.63 di Djakarta (2).
16. Semua Gubernur.
17. Semua Residen.
18. Semua Bupati.
19. Semua Kepala Daerah.
20. Semua Walikota.
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat, bagian Pendidikan dengan Perantaraan Penghubung D.P.R.-Kem.P.P.K.-R.I., Djalan Tjilatjap no.4 di Djakarta.
22. Kementerian P.P.K.-R.I., Djalan Tjilatjap no.4 di Djakarta:
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Penerangan (5).
 - c. Bagian Statistiek.

d.-

1.	•urut	T o m p a t	Bontuk	V.
2.	S T S.K.	lanc	Bontuk boru	th. po lodja ron.
3.	DJAWA BARAT :			
9.	Panggangan.	S.m.P.	Sek.Koradjinan	Kaju.
10.	Idom	S.m.P.	Sok.Tehnik.	Besi.
11.	Purwokerto.	S.m.P.	Sok.Koradjinan	Mobil.
12.	1dom	S.T.P.	Sok.Koradjinan	Listrik.
13.	Rengkasbotung.	S.m.P.	Sok.Tehnik	Porahu.
14.	Seraan.	S.m.P.	Sok.Koradjinan	Batu.
15.	1dom	S.T.P.	Sok.Koradjinan	Pr. Rumah.
16.	Sukabumi.	S.T.P.	Sok.Tehnik I	B. Gedung.
17.	1dom	S.T.P.	Sok.Koradjinan	B. Air.
18.	Tosikmaloja.	S.T.P.	Sok.Tehnik II	Mesin.
19.	1dom	S.T.P.	Sok.Koradjinan	Perkapalon.
20.	T J i a m i s .	S.T.P.	Sok.Tehnik I	Tenun.
21.	1dom	S.T.P.	Sok.Koradjinan	Spoda.
22.	T J f o d f u r .	S.T.P.	Sok.Tehnik II	Keramik.
23.	1dom	S.T.P.	Sok.Koradjinan	Tanduk.
24.	Tjibodok	S.T.P.	Sok.Tehnik	Anjom.
25.	1dom	S.T.P.	Sok.Koradjinan	Tjet.
1.	Ambarawa.	S.T.P.	Sok.Koradjinan	Blik.
2.	Benjumes.	S.T.P.	Sok.Tehnik	Bng. Kapal.
3.	1dom	S.T.P.	Sok.Koradjinan	UKIR.
	Bendjernereng.	Kursus	S.T.P.	Radio.
			Sok.Tehnik I	Mondjahit.
			Sok.Tehnik II	Kulit.

DJAWA TENGAH:

- (1) Sok.Koradjinan
1dom
Sok.Tehnik
Sok.Koradjinan
S.T.P.
Sok.Tehnik

2. Sok.Koradjinan
1dom
S.T.P.
Sok.Tehnik
Kursus

Kromat. Sok.Koradjinan